

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing daerah untuk mengubah daerahnya menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya harus adanya strategi, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam upaya tersebut terwujudnya dokumen berupa perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan, dimana dengan adanya dokumen tersebut maka akan memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD juga memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas serta indikator kinerja daerah. Adapun peraturan yang bersinergi dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023 ini sebagai tahapan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dengan periode sebelumnya, dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Nusa Tenggara Barat di tahun 2025, ditetapkan visi pembangunan adalah “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”. Pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 mengacu pada RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2005-2025, dimana visi tersebut menyatakan “Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Maju dan Sejahtera”

Adapun 5 misi untuk mencapai visi tersebut, diantaranya: 1) Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum, yaitu terwujudnya masyarakat yang tangguh menjunjung tinggi nilai nilai agama, budaya dan hukum dalam keseharian hidup dan kehidupannya serta bertanggungjawab secara arif bijaksana dan taat azas; 2) Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu pemenuhan hajat hidup masyarakat mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, keamanan dan keselamatan diri dan lingkungannya serta pemenuhan aktualisasi eksistensi didan keperibadian; 3) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yaitu terwujudnya peningkatan hasil dan manfaat pembangunan yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dalam

tatanan hubungan kemitraan pemerintah dan masyarakat yang berkeadilan, dalam kerangka supremasi hukum, penghormatan, dan penegakan hak hak azasi manusia; 4) Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, yaitu terwujudnya kemampuan dinamis mengembangkan diri dan profesionalisme masyarakat membangun kesejahteraan fisik dan mental dalam tatanan hubungan harmonis yang didukung kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta berkembangnya kearifan lokal, sebagai daya mampu keunggulan relative terhadap wilayah lain; 5) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sumber daya buatan bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan generasi masa kini dengan memperhitungkan secara cermat dan bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup dan kehidupan generasi mendatang.¹

Sementara itu dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023 ini visi Bupati dan wakil Bupati terpilih Zulkieflimansyah dan Siti Rohmi Djalilah yang telah dilantik secara resmi pada tanggal 19 September 2018 adalah “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program dan kegiatan indikatif beserta rencana pendanaannya yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai respon atas kondisi, kebutuhan dan aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Selain itu RPJMD ini juga disusun dengan mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup, rencana tata

¹RPJMD tahun 2018-2023

ruang rencana, pembangunan daerah, yaitu selain memuat program sektoral dan lintas sektoral juga memuat program kewilayahan sehingga pembangunan yang dilaksanakan memperhatikan aspek ruang dan kewilayahan yang diharapkan bisa mengoptimalkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Adapun masalah yang saat ini dihadapi oleh pemerintah Provinsi NTB seperti masih adanya penolakan bahkan sampai penutupan paksa oleh masyarakat terhadap minimarket-minimarket, yang dianggap masyarakat membunuh perekonomian kecil di sekitar daerah-daerah potensi wisata seperti di Mandalika dan kawasan taman nasional Gunung Rinjani, hal ini tentunya belum dapat membangun masyarakat yang sejahtera dan belum menunjukkan kesiapan masyarakat dalam menerima investasi asing di kawasan potensi wisata Nusa Tenggara Barat.

Melihat permasalahan tersebut maka dalam proses penyusunan dokumen RPJMD diperlukannya peran dari *stakeholder* seperti Bappeda mempunyai wewenang dalam penyusunan, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan masukan serta mengesahkan dokumen RPJMD, dan masyarakatpun juga terlibat dalam penyusunan RPJMD walaupun hanya sebatas memberikan masukan saja. Tujuan dari adanya keterlibatan aktor lain dalam penyusunan dokumen RPJMD agar pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditargetkan. Keberhasilan pembangunan di daerah ditandai dengan meratanya kemajuan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya menonjolnya aspek – aspek

tertentu. Seluruh aspek merupakan kesatuan penting yang dapat mendukung satu sama lain secara terpadu sehingga setiap potensi yang ada dapat dimanfaatkan hingga titik optimumnya.

Umumnya, pembangunan daerah ditujukan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditargetkan oleh pemerintah dan tertulis dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Namun jika dilihat dari tujuan mendasarnya, pembangunan daerah memiliki tujuan utama yang tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keberhasilan kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan penekanan angka kemiskinan. Keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terserapnya angkatan kerja dalam jumlah yang signifikan sehingga angka pengangguran di daerah dapat berkurang secara signifikan.

Adapun proses penyusunan dokumen RPJMD harus melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan, yang dimaksud dengan tahapan perumusan kebijakan merupakan tahap dari sebuah proses kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternative kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternative utama tersebut. Proses ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Tahap perumusan kebijakan melibatkan aktivitas identifikasi dan atau merangkai seperangkat alternatif kebijakan untuk mengatasi

sebuah permasalahan serta mempersempit solusi sebagai persiapan dalam penentuan kebijakan akhir.²

Perumusan kebijakan tersebut mencoba menjawab sejumlah pertanyaan seperti rencana untuk menyelesaikan masalah, tujuan dan prioritas, pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut, keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan, dampak dari pilihan tersebut, dalam proses perumusan harus adanya melibatkan proses identifikasi terhadap berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah serta kemudian mengidentifikasi dan mendesain seperangkat perangkat kebijakan spesifik yang dapat mewakili setiap pendekatan.³

Pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktifitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan diterapkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu, seperti : penyusunan anggota, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Dengan demikian sebuah kebijakan akan mudah dipahami apabila dikaji tahap demi tahap nya, dan menjadikan kebijakan yang bersifat publik akan selalu memiliki banyak pandangan dari berbagai kalangan masyarakat, serta kajiannya yang sangat dinamis. Penetapan suatu kebijakan merupakan salah satu tugas lembaga pemerintahan yang

²Cochran dan malone, 1999

³Sidney, 2007: 79 perumusan kebijakan

berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahannegara dan pembangunan bangsa yang tidak dapat digantikan, atau pun di delegasikan, di pindahkan atau bahkan di privatkan kepada organisasi di luar pemerintahan.⁴

Proses penyusunan dokumen RPJMD saat ini akan didukung dengan dokumen pembantu untuk kepala daerah dalam merumuskan kebijakan yang di sebut dengan program KLHS (kajian lingkungan hidup strategis).KLHS menjadi Salah satu instrumen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan,dokumen ini diharapkan dapat digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi ke dalam pembangunan suatu wilayah di daerah yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan dokumen KLHS RPJMD menggunakan instrumen penilaian lingkungan, melalui perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan. Penyusunan KLHS RPJMD bukan hanya dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan RPJMD oleh daerah, namun juga dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Tahun 2015, Pemerintah Provinsi NTB kemudian mengeluarkan sejumlah peraturan yang dianalisis sebagai bentuk reformasi atas regulasi – regulasi sebelumnya terkait investasi di NTB. Peraturan tersebut seperti dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal dan

⁴Mustopadidjaja AR, 1992 study kebijakan

dikeluarkannya SK Gubernur tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Gubernur kepada Kepala BKPM PTSP NTB. Pembentukan dua regulasi ini kemudian diikuti dengan diterbitkannya aturan baru pada tahun 2016 terkait dengan perbaikan infrastruktur dan kemudahan pajak serta retribusi daerah melalui adanya Perda nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur jalan strategis pola pembiayaan tahun lalu serta Perda nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Penerbitan keseluruhan aturan ini merupakan bentuk dari upaya pemerintah daerah guna meningkatkan investasi asing di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasilnya, pertumbuhan realisasi investasi yang sangat pesat dimana realisasi investasi di NTB meningkat drastis.⁵

Hal yang menarik pula untuk menjadi riset mahasiswa ilmu pemerintahan karena provinsi nusa tenggara barat (NTB) beberapa waktu yang lalu mengalami kemunduran jadwal pemilu serentak tahun 2018 sehingga terjadi keterlambatan pelantikan gubernur pemenang pemilu oleh kemendagri dikarenakan beberapa kabupaten dan kota di provinsi nusa tenggara barat mengalami bencana alam yaitu gempa bumi bahkan sampai mengakibatkan longsor di beberapa titik dataran tinggi seperti desa wisata sembalun kab.lombok timur, keadaan ini tentunya mengakibatkan terhambatnya roda pemerintahan di provinsi nusa tenggara barat (NTB). oleh karena itu pembangunan berkelanjutan ini harus lebih

⁵Perda no 3 tahun 2015 tentang penanaman modal, perda no 9 tahun 2016 terkait perbaikan infrastruktur kemudahan pajak dan retribusi, perda nomor 8 tentang retribusi kawasan ekonomi khusus mandalika

diperhatikan melihat moment yang sangat tepat untuk mengawali suatu perumusan kembali tatan kebijakan dan program pemerintah daerah di periode yang baru, dimana program dan kebijakan pemerintah tentunya akan di tuangkan kedalam dokumen RPJMD setiap daerah

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa perumusan rencana pembangunan memiliki pengaruh yang besar guna peningkatan arah pembangunan daerah maupun negara, terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang berbeda di setiap daerah oleh karena itu, upaya untuk mencapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu mengoptimalkan sekaligus meningkatkan pembangunan yang lebih signifikan dan berdampak besar bagi masyarakat, lingkungan dan daerah melalui perumusan kebijakan dan program yang di lakukan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan demikian penelitian ini akan membahas tentang proses perumusan kebijakan penyusunan dokumen RPMD di Provinsi NTB mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan, maka dari itu peneliti akan mengangkat judul “**Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (Rpjmd) Dalam Membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang**” di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dalam Membangun Membangun Nusa Tenggara Barat (NTB) yang Gemilang?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dalam Membangun Membangun Nusa Tenggara Barat (NTB) yang Gemilang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dalam Membangun Membangun Nusa Tenggara Barat (NTB) yang Gemilang
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dalam Membangun Membangun Nusa Tenggara Barat (NTB) yang Gemilang

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dapat memberikan dua manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang analisis proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Nusa Tenggara Barat serta penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dan informasi bagi pihak yang berminat dan terinspirasi dengan penelitian ini, selain itu penelitian ini merupakan hasil dari ilmu yang diperoleh pada mata kuliah Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah daerah yang harus semakin mengetahui fenomena yang ada sehingga dalam proses penyusunan RPJMD sesuai dengan kebutuhan daerah, selain bermanfaat untuk pemerintah daerah penelitian ini juga menjadi salah satu proses dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu ilmu pemerintahan dan dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat khususnya para organisasi atau LSM yang ada di NTB agar ikut terlibat dan berperan aktif dalam memberikan masukan pada proses penyusunan dokumen RPJMD.

1.5 DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual diartikan sebagai definisi-definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lainnya atau mendefinisikan suatu konstruk dengan konstruk lainnya.⁶ Suatu definisi harus mampu menggambarkan karakteristik konsep yang didefinisikan secara esensial dan objektif. Definisi konseptual memberikan penjelasan yang singkat dan jelas mengenai konsep yang akan digunakan sebagai perspektif dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, perlu peneliti mendefinisikan beberapa konsep yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Analisis kebijakan

Analisis kebijakan merupakan suatu proses kognitif, sementara pembuatan kebijakan bersifat politis. Keberadaan analisis kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Sehingga analisis kebijakan diperlukan untuk mengetahui kebijakan apa yang cocok dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan tersebut dibuat sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Analisis dapat dikembangkan di awal pembuatan suatu kebijakan ataupun di akhir penerapan kebijakan. Selain itu analisis kebijakan juga berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab akibat dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan.⁷ Artinya analisis kebijakan merupakan bentuk penelitian terapan yang dijadikan untuk mencapai tingkat pengetahuan

⁶Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama Hal 119.

⁷ Winarno (2005:27)

yang lebih mendalam tentang isu-isu teknik sosial yang membawakan solusi-solusi yang lebih baik.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 5 tahun, dan RPJMD itu sendiri berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. (Pasal 1 Nomer 4 UU Nomer 17 Tahun 2007 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025). RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visim misi dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujua, sasaran, startegi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

1.6 DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan kondisi-kondisi, bahan-bahan, dan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk mengidentifikasi atau menghasilkan kembali satu atau lebih acuan konsep yang didefinisikan.⁸ Suatu konsep masih bersifat abstrak dan general. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi variabel-variabel dari konsep tersebut sehingga mempermudah analisis dalam suatu penelitian. Selain itu, melalui definisi operasional dari suatu konsep sebagai definisi variabel penelitian, akan mengurangi kesalahan pengamatan dalam penelitian. Adapun variabel-variabel yang akan didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Ada beberapa tahapan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 - a. Penyusunan agenda
 - b. Formulasi kebijakan
 - c. Adopsi kebijakan
2. Permasalahan yang dihadapi dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui analisis SWOT.

⁸ *Lok.cit* .Silalahi, Ulber. Hal 119

1.7 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode penelitian ini merupakan sebuah prosedur ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis guna mendapatkan data agar dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana metode kualitatif itu sendiri adalah ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu kejadian atau pun fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi antara peneliti dengan objek atau fenomena yang di teliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam deskriptif kualitatif ini data akan di ambil dengan sebenar-benarnya, dimana penulis akan mendeskripsikan tentang analisis proses penyusunan perumusan dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data Primer, merupakan data yang di dapatkan atau diperoleh langsung dari narasumber. Sumber data primer berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DPRD, dan LSM yang didapat berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi,

sedangkan data sekunder merupakan data tambahan yang dapat dari studi kepustakaan, atau sumber lainnya seperti jurnal, buku, internet, peraturan perundang-undangan serta sumber bacaan lainnya yang berkaitan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan laporan akhir ini penulis mengadakan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan beberapa cara diantaranya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi di artikan sebagai metode pengumpulan data atau keterangan yang dilakukan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki⁹. Peneliti akan melakukan observasi lapangan, dimana maksud dari observasi lapang ini adalah, peneliti turun lapang ke tempat penelitian untuk melihat secara langsung bagaimana keadaan lapangan dan memahami hal-hal yang di dapat dari subyek penelitian terkait proses penyusunan perumusan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu¹⁰. Teknik ini di gunakan untuk mendapatkan informasi yang sebanyak- banyaknya dan mendalam agar terpenuhinya data yang di butuhkan oleh peneliti. Wawancara pada penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DPRD, dan LSM Nusa Tenggara Barat

⁹ Arikunto.S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*; (Jakarta:Rineka Ciota,2006)),hal 124

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*; (Bandung; CV Alfabeta, ,2013). Hal 231

(NTB). Peneliti akan menentukan focus daftar pertanyaan atau biasa di sebut *interview guide*. Dengan demikian peneliti dapat terarah dalam mewawancara subyek penelitian.

Setelah melakukan observasi dan wawancara maka peneliti melakukan dokumentasi, dimana teknik dokumentasi berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga ataupun organisasi maupun dari perorangan.¹¹ Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.¹² Dokumentasi merupakan salah satu metode terpenting dalam teknik pengumpulan data karna dokumentasi dapat menunjukkan sebuah fakta atau kebenaran yang terjadi di lapangan. Dari teknik pengumpulan data ini peneliti akan mencari data pendukung seperti foto, tabel, grafik dan lain-lain yang berhubungan dengan yang di teliti, dimana dokumentasi ini adalah data penguat dalam pendeskripsian hasil penelitian.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang – orang yang dapat memberikan sebuah informasi tentang sesuatu yang sedang di teliti. Peneliti akan memfokuskan penelitiannya terhadap proses penyusunan perumusan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan demikian untuk

¹¹ Ibid,hal 72

¹² Ibid;hal 240

mendapatkan informasi yang relevan, maka subyek penelitian dalam penelitian ini adalah :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat bagi penulis untuk mendapatkan data dari suatu penelitian yang sedang diteliti sehingga data yang di dapatkan lebih akurat dan dapat di pertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Jl. Flamboyan Nomor 2 Mataram 83126 NTB Indonesia, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif mengenai analisis proses penyusunan perumusan RPJMD. Pengertian dari analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah untuk dipahami, dan temuannya dapat di

informasikan kepada orang lain¹³. Ada Beberapa cara untuk menganalisis sebuah data, diantaranya adalah pengumpulan data, reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan.

Analisis data yang pertama dilakukan pengumpulan data, pengumpulan data dapat diartikan sebagai bagian integral dari kegiatan analisis data, dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.¹⁴Proses pengumpulan data dilakukan saat pra penelitian dan pada saat penelitian. Pada kegiatan ini tidak ada waktu secara spesifik untuk menentukan batas akhir dari pengumpulan data di lapangan, karena sepanjang penelitian masih berlangsung selama itulah pengumpulan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti akan dilakukan. Sebagaimana yang telah peneliti sampaikan di sub-bab sebelumnya bahwa pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung, melakukan wawancara dengan informan, membuat dokumentasi dan membuat catatan di lapangan.

Langkah yang kedua adalah Reduksi data, dimana dalam kegiatan reduksi data diantaranya adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.¹⁵Pada proses ini, peneliti lakukan setelah mendapatkan data-data dari kegiatan wawancara, hasil observasi dan hasil studi dokumentasi yang kemudian

¹³ Bogdan dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:CV Alfabeta ;2013) Hal 244

¹⁴ Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 70

¹⁵ *Op.cit.* Sugiyono. Hal 247

diubah menjadi bentuk tulisan dan dikategorisasikan sesuai fokus bahasan masing-masing. Setelah itu dilakukan reduksi atau memilah data-data yang telah dikumpulkan lalu menggabungkan atau menghubungkan antar data yang telah dipilah. Dengan demikian data yang telah direduksi akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menemui data-data yang sesuai dengan pokok bahasan. Selain daripada itu dapat mempermudah proses pengumpulan data selanjutnya.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹⁶ Penyajian data di arahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah di pahami, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar katagori serta diagram alur.

Terakhir dalam penganalisa data adalah kesimpulan dimana kesimpulan data dapat diartikan sebagai proses verifikasi dari data-data yang telah dipilah pada tahap sebelumnya yang kemudian disimpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁷ Jadi pada tahap kesimpulan data menjurus pada jawaban pada fokus bahasan dan mengungkap fakta dari pertanyaan

¹⁶ *Ibid*, Hal 341.

¹⁷ *Ibid*.Hal. 342.

penelitian yang diajukan sebelumnya. Pada tahap ini proses analistik tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara simultan di antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Maka dapat di tarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini dan dapat diketahui hasil akhir dari suatu penelitian.

Analisis data disini peneliti akan mengolah dan menafsirkan data untuk dianalisis, langkah ini melibatkan transkrip atau salinan wawancara, mengetik catatan lapangan, mensortir dan mengatur data menjadi berbagai jenis sesuai dengan sumber informasi yang peneliti dapatkan. Kemudian, membaca keseluruhan data yang telah diperoleh kemudian membuat catatan atau gagasan penting dari data yang telah di peroleh tersebut.

